

PROBLEMATIKA KOPERASI MERAH PUTIH DI NAGARI TANJUNG BERINGIN MENURUT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH TANFIZIYAH

Problems of Koperasi Merah Putih in Nagari Tanjung Beringin from the Perspective of Fiqh Siyasa Tanfiziyah

Ezima Putri & Busyro

UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi
ezimaputri28@gmail.com; busyro@uinbukittinggi.ac.id

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Jun 13, 2026	Jul 11, 2026	Jul 23, 2026	Jul 28, 2026

Abstract

The establishment of Koperasi Merah Putih in Nagari Tanjung Beringin represents a government effort to strengthen the village-based community economy. However, its implementation continues to face various institutional, administrative, and technical constraints that affect the effectiveness of cooperative management. This study aimed to analyze the implementation of Koperasi Merah Putih in Nagari Tanjung Beringin and examine the problems that have emerged from the perspective of *Fikih Siyasa Tanfiziyah*. The study employed a qualitative approach with a descriptive design. Primary data were obtained through interviews with cooperative managers and members, the nagari government, religious leaders, customary leaders, and community members, whereas secondary data were derived from laws and regulations, books, journals, and supporting documents. Data were collected through observation, interviews, and documentation and were subsequently analyzed qualitatively. The results showed that Koperasi Merah Putih was established through a Special Village Deliberation as an implementation of government policy to improve community welfare. Despite

receiving government support and positive responses from the community, the cooperative continued to face limitations in capital, facilities and infrastructure, human resource capacity, and administrative capabilities. From the perspective of *Fikih Siyasah Tanfiziyyah*, the implementation of the cooperative reflected the principles of trustworthiness, deliberation, justice, and public welfare, but remained suboptimal in terms of governance and supervision. These findings confirm that the successful implementation of Koperasi Merah Putih requires institutional strengthening, enhancement of management capacity, and continuous government assistance. This study contributes to the development of *Fikih Siyasah Tanfiziyyah* studies in the implementation of village economic policies and provides practical implications for local governments and cooperative managers in realizing professional, transparent, and sustainable governance.

Keywords: Koperasi Merah Putih; *Fikih Siyasah Tanfiziyyah*; Cooperative Governance; Nagari Government; Community Welfare

Abstrak: Pembentukan Koperasi Merah Putih di Nagari Tanjung Beringin merupakan upaya pemerintah untuk memperkuat perekonomian masyarakat berbasis desa. Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala kelembagaan, administratif, dan teknis yang memengaruhi efektivitas pengelolaan koperasi. Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan Koperasi Merah Putih di Nagari Tanjung Beringin serta mengkaji problematika yang muncul berdasarkan perspektif *Fikih Siyasah Tanfiziyyah*. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pengurus dan anggota koperasi, pemerintah nagari, tokoh agama, tokoh adat, serta masyarakat, sedangkan data sekunder bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan dokumen pendukung. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Koperasi Merah Putih dibentuk melalui Musyawarah Desa Khusus sebagai implementasi kebijakan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meskipun memperoleh dukungan pemerintah dan respons positif masyarakat, koperasi masih menghadapi keterbatasan modal, sarana dan prasarana, kapasitas sumber daya manusia, serta kemampuan administratif. Ditinjau dari perspektif *Fikih Siyasah Tanfiziyyah*, pelaksanaan koperasi telah mencerminkan prinsip amanah, musyawarah, keadilan, dan kemaslahatan, tetapi belum optimal dalam aspek tata kelola dan pengawasan. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan implementasi Koperasi Merah Putih memerlukan penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas pengelola, serta pendampingan pemerintah secara berkelanjutan. Penelitian ini berkontribusi terhadap pengembangan kajian *Fikih Siyasah Tanfiziyyah* dalam pelaksanaan kebijakan ekonomi desa serta memberikan implikasi praktis bagi pemerintah daerah dan pengelola koperasi dalam mewujudkan tata kelola yang profesional, transparan, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Koperasi Merah Putih; *Fikih Siyasah Tanfiziyyah*; Tata Kelola Koperasi; Pemerintah Nagari; Kesejahteraan Masyarakat

PENDAHULUAN

Koperasi memiliki peran strategis sebagai salah satu sarana pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan

bersama (Sawitri et al., 2026). Keberadaan koperasi sejalan dengan amanat Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan pentingnya penyelenggaraan perekonomian berdasarkan prinsip keadilan sosial (Kader, 2018; Arifin, 2025). Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, koperasi merupakan badan usaha yang anggotanya terdiri atas perseorangan maupun badan hukum koperasi (Rahayu & Utama, 2020; Donatha & Sawitri, 2025). Dalam pelaksanaannya, koperasi menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip-prinsip koperasi dan semangat kebersamaan. Selain berfungsi sebagai badan usaha, koperasi juga berperan sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berlandaskan pada asas kekeluargaan dan gotong royong (Waruwu et al., 2025; Thayf et al., 2022). Hutagalung dan Batubara (2021) menjelaskan bahwa koperasi syariah berperan dalam menggerakkan roda perekonomian melalui penyediaan layanan keuangan yang sesuai prinsip syariah, pemberdayaan usaha masyarakat, serta peningkatan kesejahteraan anggota. Peran tersebut menjadikan koperasi syariah sebagai salah satu instrumen penting dalam mewujudkan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan, karena tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada pemerataan kesejahteraan dan penguatan kapasitas ekonomi masyarakat.

Siyasah adalah istilah dalam kajian Islam yang merujuk pada segala bentuk pengaturan, pengelolaan, dan kebijakan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berlandaskan prinsip-prinsip syariat Islam (Muzaki et al., 2024). Secara sederhana, siyasah dapat dipahami sebagai konsep politik dan tata kelola pemerintahan dalam Islam yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan, keadilan, dan keteraturan dalam masyarakat (Pratama, 2025). Siyasah Tanfiziyah adalah bagian dari fiqh siyasah yang berkaitan dengan pelaksanaan dan penerapan kebijakan pemerintahan dalam menjalankan keputusan, peraturan, serta administrasi negara (Mayyadah et al., 2025). Secara sederhana, siyasah tanfiziyah mengatur bagaimana sebuah keputusan atau hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau pemimpin negara dilaksanakan secara efektif melalui sistem administrasi, birokrasi, dan lembaga-lembaga pelaksana.

Dalam konteks ini, penguasa atau pemerintah memiliki kewenangan untuk membuat dan melaksanakan kebijakan, menegakkan hukum, serta mengelola sumber daya masyarakat dengan tetap berpegang pada prinsip keadilan, Amanah dan tanggung jawab. Pelaksanaan kekuasaan dalam siyasah tanfiziyah tidak bersifat absolut, melainkan terikat oleh nilai-nilai syariat Islam, sehingga setiap kebijakan yang diambil harus bertujuan untuk menjaga kemaslahatan umum dan mencegah terjadinya kezaliman.

Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Indonesia terus mendorong pengembangan koperasi berbasis desa sebagai strategi untuk memperkuat perekonomian masyarakat di tingkat lokal. Salah satu program yang diinisiasi adalah pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), yang diperkenalkan sebagai bagian dari upaya peningkatan ketahanan pangan nasional dan pemberdayaan ekonomi desa (Purnamawati, 2025; Hutagol et al., 2026; Mulyadi & Rahmati, 2026). Gagasan pembentukan koperasi tersebut pertama kali disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam kegiatan retreat kepala daerah di Akademi Militer Magelang yang berlangsung pada 21–28 Februari 2025 (Wicaksono, 2025). Selanjutnya, melalui Rapat Terbatas di Istana Negara pada 3 Maret 2025, pemerintah menetapkan peluncuran sebanyak 80.000 koperasi desa yang secara resmi diperkenalkan pada peringatan Hari Koperasi Nasional tanggal 12 Juli 2025. Kehadiran KDMP diharapkan mampu menjadi penggerak utama perekonomian daerah melalui pengembangan berbagai unit usaha, seperti layanan simpan pinjam, penyediaan kebutuhan pokok, pelayanan kesehatan desa, serta pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) (Yani & Wahyuni, 2026).

Koperasi desa merah putih merupakan salah satu program strategis nasional yang diinisiasi oleh pemerintah Indonesia sebagai Upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat desa melalui prinsip usaha Bersama dan ekonomi kerakyatan. Program ini bertujuan untuk mengoptimalkan potensi lokal desa dengan membentuk sebuah koperasi yang dikelola oleh masyarakat dan untuk masyarakat desa, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan ketahanan ekonomi desa secara berkelanjutan untuk selanjutnya (Saputri et al., 2025). Dalam konteks ini koperasi desa merah putih tidak hanya berfungsi sebagai lembaga ekonomi yang menyediakan berbagai layanan seperti gerai sembako, simpan pinjam, *cold storage*, dan klinik desa, tetapi juga sebagai wadah yang mengintegrasikan berbagai unit usaha produktif yang dapat menyerap tenaga kerja dan memotong rantai pasok yang panjang, sehingga memperkuat ekonomi desa dari hulu ke hilir (Hamdani, 2025). Melihat banyaknya potensi besar yang dimiliki oleh koperasi dapat menjadi sebuah modal yang kuat dalam Pembangunan ekonomi secara menyeluruh melalui pemerintahan yang paling bawah yaitu desa (Ariandy et al., 2025).

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas koperasi sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat. Penelitian Waruwu et al., (2025) menegaskan bahwa koperasi merupakan sokoguru perekonomian nasional yang berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan ekonomi kerakyatan. Selanjutnya, Hutagaol et

al., (2026) menjelaskan bahwa Koperasi Desa Merah Putih memiliki potensi besar dalam mendukung ketahanan ekonomi desa melalui pemberdayaan masyarakat dan penguatan kelembagaan ekonomi lokal. Penelitian Mulyadi & Rahmati, (2026) juga menunjukkan bahwa revitalisasi Koperasi Merah Putih berdasarkan pendekatan *maqashid syariah* mampu mendukung pemulihan ekonomi pedesaan secara berkelanjutan.

Meskipun demikian, sebagian besar penelitian terdahulu masih berfokus pada aspek regulasi, konsep kelembagaan, atau kontribusi ekonomi koperasi secara umum. Kajian yang secara khusus menganalisis berbagai problematika implementasi Koperasi Merah Putih pada tingkat nagari/desa berdasarkan perspektif *fiqh siyasah tanfiziyah* masih sangat terbatas. Dengan demikian, masih terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*), terutama terkait bagaimana prinsip amanah, keadilan, musyawarah, dan kemaslahatan diterapkan dalam pelaksanaan kebijakan Koperasi Merah Putih serta bagaimana prinsip-prinsip tersebut dapat digunakan untuk menjelaskan berbagai kendala kelembagaan, administratif, dan teknis yang dihadapi koperasi.

Implementasi kebijakan koperasi berbasis desa di berbagai daerah masih menghadapi sejumlah tantangan yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Berbagai permasalahan, baik yang bersifat kelembagaan, administratif, maupun teknis, sering kali memengaruhi efektivitas koperasi dalam menjalankan fungsinya sebagai sarana peningkatan kesejahteraan masyarakat. Salah satu fenomena tersebut dapat ditemukan pada pembentukan Koperasi Merah Putih di Nagari Tanjung Beringin, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, yang didirikan melalui Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) pada tanggal 26 Mei 2025. Kondisi ini menjadi menarik untuk dianalisis karena mencerminkan adanya tantangan dalam pelaksanaan kebijakan ekonomi berbasis masyarakat di tingkat lokal. Selain ditinjau dari perspektif hukum positif, kajian ini juga penting dianalisis melalui perspektif *fiqh siyasah tanfiziyah*, yaitu cabang kajian politik Islam yang menitikberatkan pada pelaksanaan kebijakan pemerintahan berdasarkan prinsip amanah, keadilan, musyawarah, dan kemaslahatan umat.

Berdasarkan fenomena tersebut, peneliti berpandangan bahwa keberhasilan implementasi Koperasi Merah Putih tidak hanya ditentukan oleh pembentukan kelembagaan atau pemenuhan aspek administratif semata, tetapi juga dipengaruhi oleh kualitas tata kelola, kapasitas sumber daya manusia, partisipasi masyarakat, serta efektivitas pendampingan pemerintah. Berbagai kendala yang muncul menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan

normatif pembentukan koperasi dengan praktik pelaksanaannya di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih mendalam untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan Koperasi Merah Putih sehingga dapat dirumuskan rekomendasi yang tepat bagi pengembangan koperasi yang berkelanjutan.

Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada penggunaan perspektif fiqh siyasah tanfiziyah sebagai kerangka analisis dalam mengkaji implementasi Koperasi Merah Putih di tingkat nagari. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih banyak menitikberatkan pada aspek hukum positif, kelembagaan koperasi, atau pemberdayaan ekonomi masyarakat, penelitian ini mengintegrasikan prinsip-prinsip fiqh siyasah tanfiziyah, yaitu amanah, keadilan, musyawarah, dan kemaslahatan sebagai landasan untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan koperasi. Pendekatan tersebut diharapkan mampu memberikan perspektif baru mengenai tata kelola koperasi yang tidak hanya efektif secara administratif, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai hukum Islam.

Secara teoritis, penelitian ini menggunakan teori fiqh siyasah tanfiziyah, yaitu cabang fiqh siyasah yang membahas pelaksanaan kekuasaan eksekutif dalam penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan prinsip amanah, keadilan, syura (musyawarah), dan kemaslahatan umat. Teori ini menjadi landasan dalam menganalisis sejauh mana implementasi Koperasi Merah Putih telah sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan Islam yang baik (good governance).

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pelaksanaan Koperasi Merah Putih di Nagari Tanjung Beringin serta mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Kajian ini memfokuskan perhatian pada aspek kelembagaan, administratif, dan teknis yang memengaruhi efektivitas koperasi sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga menelaah permasalahan tersebut melalui perspektif fiqh siyasah tanfiziyah, yang menekankan prinsip amanah, keadilan, musyawarah, dan kemaslahatan dalam pelaksanaan kebijakan pemerintahan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan tata kelola koperasi yang lebih efektif, profesional, dan sesuai dengan nilai-nilai hukum Islam.

METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam

mengenai pelaksanaan Koperasi Merah Putih di Nagari Tanjung Beringin serta berbagai problematika yang dihadapi dalam aspek kelembagaan, administratif, dan teknis berdasarkan perspektif *fiqh siyasah tanfi'iyah*. Penelitian dilakukan pada kondisi alamiah (*natural setting*) sehingga peneliti tidak memberikan perlakuan terhadap objek yang diteliti.

Penelitian ini menggunakan desain deskriptif kualitatif (*descriptive qualitative study*). Desain tersebut digunakan untuk mendeskripsikan secara sistematis pelaksanaan Koperasi Merah Putih, mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi dalam implementasinya, serta menganalisis kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip *fiqh siyasah tanfi'iyah*. Penelitian dilaksanakan di Nagari Tanjung Beringin, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman.

Partisipan penelitian ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam pelaksanaan Koperasi Merah Putih. Informan penelitian terdiri atas Ketua Koperasi, Wakil Ketua Bidang Anggota, Sekretaris, Bendahara, perwakilan Kementerian Koperasi, pemerintah nagari, tokoh agama, tokoh adat, serta masyarakat yang mengetahui maupun terlibat dalam aktivitas koperasi. Teknik ini digunakan agar informasi yang diperoleh sesuai dengan fokus penelitian dan mampu memberikan data yang komprehensif mengenai fenomena yang diteliti.

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti (*human instrument*) yang didukung oleh pedoman wawancara, lembar observasi, dan dokumentasi. Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik, yaitu: 1) Wawancara, mendalam (*in-depth interview*) dengan para informan penelitian. 2) Observasi, yaitu mengamati secara langsung kondisi dan aktivitas Koperasi Merah Putih di Nagari Tanjung Beringin. 3) Dokumentasi, berupa peraturan perundang-undangan, dokumen koperasi, arsip, serta berbagai literatur yang relevan. Data yang diperoleh diklasifikasikan menjadi data primer dan data sekunder untuk memperkuat hasil penelitian.

Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi tiga tahapan, yaitu: 1) Reduksi data (*data reduction*), yaitu proses memilih, memusatkan perhatian, menyederhanakan, dan mengorganisasi data yang diperoleh dari lapangan. 2) Penyajian data (*data display*), yaitu menyusun data secara sistematis dalam bentuk uraian naratif sehingga memudahkan penarikan makna. 3) Penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing/verification*), yaitu menginterpretasikan hasil penelitian dan melakukan pengecekan ulang terhadap temuan yang diperoleh.

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber, yaitu membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan dan dokumen sehingga meningkatkan kredibilitas hasil penelitian.

HASIL

Pelaksanaan Koperasi Merah Putih Di Nagari Tanjung Beringin

1. Awal Mula Pendirian Koperasi Merah Putih di Tanjung Beringin

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara dengan para responden, dapat disimpulkan bahwa Koperasi Merah Putih Tanjung Beringin lahir dari keprihatinan terhadap kondisi ketimpangan ekonomi masyarakat desa serta dorongan untuk mewujudkan kemandirian ekonomi berbasis kebersamaan. Proses pendiriannya tidak terjadi secara spontan, melainkan melalui tahapan musyawarah yang disepakati bersama dalam Musyawarah Desa Khusus (Musdessus) pada 26 Mei 2025 sebagai bagian dari program pemerintah nagari. Sejak awal, koperasi ini diposisikan bukan hanya sebagai lembaga ekonomi, tetapi juga sebagai wadah pemberdayaan masyarakat desa yang berlandaskan prinsip kekeluargaan, gotong royong, dan kepemilikan bersama dalam meningkatkan kesejahteraan warga Nagari Tanjung Beringin.

Selain itu, Koperasi Merah Putih Tanjung Beringin juga telah menunjukkan adanya sistem kelembagaan yang cukup terstruktur, baik dari sisi visi dan misi, struktur organisasi, maupun pembagian tugas pengurus yang berjalan sesuai fungsi masing-masing. Hal ini mencerminkan upaya mewujudkan tata kelola koperasi yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel dalam mendukung keberlangsungan kegiatan koperasi. Dengan demikian, keberadaan Koperasi Merah Putih diharapkan dapat menjadi instrumen penting dalam memperkuat ekonomi masyarakat desa serta mendorong terciptanya kemandirian ekonomi yang berkelanjutan di Nagari Tanjung Beringin.

2. Tujuan Pendirian Koperasi Merah Putih di Tanjung Beringin

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara dengan para responden, dapat disimpulkan bahwa tujuan pendirian Koperasi Merah Putih di Tanjung Beringin pada dasarnya berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan ekonomi berbasis koperasi. Koperasi ini dipandang sebagai wadah usaha bersama yang dibangun atas dasar kebersamaan, kekeluargaan, dan gotong royong, sehingga masyarakat

dapat berperan aktif dalam kegiatan ekonomi dan tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga subjek dalam pengembangan ekonomi desa.

Selain itu, Koperasi Merah Putih juga diarahkan untuk memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat melalui pengembangan unit usaha yang mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari, membuka lapangan pekerjaan, serta meningkatkan pendapatan warga. Program ini masih dalam tahap pengembangan, namun sudah menunjukkan adanya langkah awal seperti pembentukan struktur organisasi dan mulai berjalannya beberapa unit usaha. Hal ini menunjukkan adanya upaya nyata pemerintah dan masyarakat dalam membangun sistem ekonomi yang lebih mandiri dan berkelanjutan di Nagari Tanjung Beringin. Dengan demikian, Koperasi Merah Putih dapat dipahami sebagai instrumen penting dalam mewujudkan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan, di mana kesejahteraan masyarakat menjadi tujuan utama melalui pengelolaan koperasi yang berbasis partisipasi dan kebersamaan.

3. Dukungan Pemerintah Terhadap Usaha Yang Dijalan Koperasi Merah Putih di Tanjung Beringin

Berdasarkan hasil wawancara dengan para responden, dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah memiliki pengaruh yang sangat penting dalam perkembangan Koperasi Merah Putih di Kenagarian Tanjung Beringin. Pemerintah tidak hanya berperan sebagai pembuat kebijakan, tetapi juga turut terlibat secara aktif dalam memberikan pembinaan, pendampingan, serta pelatihan kepada pengurus koperasi. Hal ini menunjukkan adanya komitmen pemerintah dalam memastikan koperasi dapat berjalan sesuai dengan tujuan pembentukannya, yaitu meningkatkan kesejahteraan anggota melalui kegiatan ekonomi yang berbasis kebersamaan dan berkelanjutan. Selain itu, dukungan pemerintah juga terlihat melalui penguatan aspek manajemen, peningkatan literasi keuangan, serta fasilitasi akses permodalan yang sangat membantu dalam pengembangan usaha koperasi di tingkat lokal.

Di sisi lain, hasil wawancara juga menunjukkan bahwa Koperasi Merah Putih masih berada pada tahap pengembangan sehingga pelaksanaannya belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Berbagai kendala masih dihadapi, terutama dalam hal keterbatasan sarana, prasarana, serta permodalan yang menjadi hambatan utama dalam menjalankan kegiatan usaha koperasi secara maksimal. Meskipun demikian, koperasi ini telah mulai menunjukkan perkembangan positif dengan berjalannya beberapa unit usaha seperti gerai sembako dan penjualan gas, serta adanya kerja sama dengan pihak luar dalam bentuk bantuan modal. Kondisi ini menggambarkan bahwa koperasi memiliki potensi yang cukup baik untuk

berkembang lebih jauh apabila didukung dengan pengelolaan yang lebih terarah dan pendampingan yang berkelanjutan dari pemerintah maupun pihak terkait.

Secara keseluruhan, dapat dilihat bahwa keberhasilan Koperasi Merah Putih di Tanjung Beringin sangat ditentukan oleh sinergi antara pemerintah dan pengurus koperasi. Pembinaan yang dilakukan secara konsisten, dukungan permodalan, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi faktor penting dalam mendorong koperasi agar mampu tumbuh lebih mandiri, profesional, dan berdaya saing. Selain itu, keberadaan kendala pada tahap awal perkembangan merupakan hal yang wajar dan dapat dijadikan sebagai proses pembelajaran dalam memperkuat sistem pengelolaan koperasi. Dengan demikian, peran aktif pemerintah yang diiringi dengan komitmen pengurus koperasi menjadi kunci utama dalam mewujudkan koperasi yang kuat, mandiri, dan berkelanjutan di masa mendatang.

4. Tanggapan Masyarakat terhadap Keberadaan Koperasi Merah Putih

Berdasarkan wawancara penulis dengan beberapa narasumber. Masyarakat Tanjung Beringin memberikan respon positif terhadap kehadiran koperasi merah putih. Walaupun dampak keseluruhan dari koperasi merah putih belum dirasakan sepenuhnya. Namun masyarakat menilai bahwa koperasi ini akan mampu membantu perekonomian masyarakat nantinya, salah satunya dengan menjadi sumber permodalan yang mudah dijangkau oleh petani, pedagang dan pelaku UMKM. Selain itu, masyarakat menilai bahwa koperasi merah putih akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mempermudah pemasaran hasil produksi dan dapat meningkatkan semangat gotong royong serta rasa kekeluargaan. Berdasarkan informasi yang penulis dapatkan, bahwa masyarakat Tanjung Beringin menyambut baik keberadaan koperasi merah putih, karena koperasi merah putih akan membuka berbagai kesempatan untuk kehidupan masyarakat yang lebih baik dan sejahtera kedepannya.

Di sisi lain, penulis juga melihat bahwa tingkat kepercayaan masyarakat menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan koperasi ke depan. Harapan masyarakat cukup besar agar koperasi ini tidak mengalami kegagalan seperti koperasi sebelumnya dan mampu memberikan manfaat nyata bagi anggota maupun masyarakat luas. Meskipun terdapat dukungan, masyarakat masih bersikap hati-hati dan menunggu perkembangan lebih lanjut sebelum memberikan penilaian yang lebih tegas.

Selain itu, terkait perbandingan dengan program ekonomi lainnya, masyarakat belum dapat menyatakan bahwa Koperasi Merah Putih lebih unggul. Hal ini disebabkan karena program koperasi masih dalam tahap pengembangan sehingga hasil dan kinerjanya belum

dapat dibandingkan secara menyeluruh dengan program ekonomi lain yang sudah lebih lama berjalan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa masyarakat memberikan tanggapan yang cukup positif terhadap keberadaan Koperasi Merah Putih, namun manfaatnya belum dirasakan secara langsung. Selain itu, masyarakat belum dapat menilai apakah program ini lebih baik dibandingkan program ekonomi lainnya karena masih menunggu perkembangan dan hasil nyata dari koperasi tersebut.

5. Dampak Ekonomi Masyarakat Dengan Keberadaan Koperasi Merah Putih

Berdasarkan hasil wawancara dengan para responden, dapat diketahui bahwa masyarakat memiliki harapan yang cukup besar terhadap keberadaan Koperasi Merah Putih di Nagari Tanjung Beringin. Masyarakat berharap koperasi dapat berjalan dengan baik, berkembang secara berkelanjutan, serta tidak mengalami kegagalan seperti beberapa koperasi yang pernah ada sebelumnya. Selain itu, masyarakat menginginkan agar koperasi mampu menjadi wadah ekonomi yang dapat memberikan manfaat nyata bagi anggota maupun masyarakat sekitar, sehingga keberadaannya benar-benar dirasakan dalam meningkatkan kondisi ekonomi masyarakat.

Masyarakat juga berharap Koperasi Merah Putih mampu membantu memenuhi kebutuhan ekonomi anggota, membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan, serta mendorong kesejahteraan masyarakat. Koperasi dipandang sebagai sarana yang dapat memperkuat perekonomian lokal melalui berbagai kegiatan usaha yang dijalankan. Oleh karena itu, masyarakat menginginkan agar koperasi terus berkembang menjadi usaha yang maju, memberikan keuntungan bagi anggota, serta mampu menciptakan peluang usaha baru yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat secara lebih luas.

Di samping harapan terhadap manfaat ekonomi, masyarakat juga menaruh harapan besar agar koperasi dikelola secara profesional, transparan, dan berkelanjutan. Pengelolaan yang baik dianggap penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat serta menghindari citra negatif yang pernah melekat pada beberapa koperasi sebelumnya. Dengan pengelolaan yang efektif serta dukungan dari pemerintah, pengurus, dan masyarakat, Koperasi Merah Putih diharapkan mampu menjadi lembaga ekonomi yang kuat, mandiri, dan berperan nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Nagari Tanjung Beringin.

Tinjauan Siyasah Tanfidziyah Terhadap Kendala Kelembagaan, Administratif, Dan Teknis Yang Muncul Dalam Proses Pembentukan Koperasi Merah Putih Di Kenagarian Tanjung Beringin

Relevansi antara siyasah tanfiziyah dan Koperasi Merah Putih terletak pada aspek pelaksanaan kebijakan, tata kelola, dan tanggung jawab kelembagaan. Dalam siyasah tanfiziyah, kekuasaan adalah amanah, setiap pejabat atau pengurus wajib mempertanggung jawabkan kebijakannya kepada Allah dan masyarakat. Dalam koperasi merah putih pengurus koperasi memang amanah terhadap anggota. Dana koperasai adalah milik bersama, bukan milik pribadi. Setiap Keputusan harus dipertanggung jawabkan melalui rapat anggota. Jika amanah tidak dijalankan (misalnya penyalahgunaan dana atau transparansi yang lemah), maka hal tersebut bertentangan dengan prinsip dasar siyasah tanfiziyah.

Dalam koperasi merah putih pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) harus adil sesuai partisipasi anggota. Tidak boleh ada diskriminasi dalam pelayanan koperasi. Kebijakan pinjaman atau bantuan harus proporsional dan transparan. Dengan demikian, koperasi menjadi sarana implementasi keadilan sosial sebagaimana cita-cita ekonomi islam dan juga sejalan dengan nilai keadilan sosial dalam sistem ekonomi di indonesia. Tujuan utama siyasah tanfiziyah adalah mewujudkan kemaslahatan umum (masalah `amanah). Koperasi merah putih didirikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa/nagari. Mengurangi ketimpangan ekonomi, memberdayakan ekonomi berbasis komunitas artinya, koperasi adalah instrument nyata untuk mewujudkan kemaslahatan ekonomi umat. Selama kebijakan koperasi berpihak pada kesejahteraan bersama, maka ia selaras dengan prinsip siyasah tanfiziyah.

Secara normatif, koperasi merah putih sangat relevan dengan prinsip siyasah tanfiziyah karena mengandung nilai keadilan ekonomi berbasis musyawarah, berorientasi pada kesejahteraan bersama. Namun secara praktis, jika terjadi konflik internal, lemahnya manajemen, penyalahgunaan wewenang, minimnya transparansi, maka itu menunjukkan adanya penyimpangan dari prinsip-prinsip siyasah tanfiziyah dalam pelaksanaannya.

Dalam perspektif siyasah tanfiziyah, pelaksanaan pemerintahan dan kebijakan publik harus berorientasi pada kemaslahatan masyarakat serta dijalankan secara amanah, adil, dan bertanggung jawab. Pembentukan koperasi merah putih di Nagari Tanjung Beringin dapat dipandang sebagai bentuk kebijakan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan bersama. Oleh karena itu, keberadaan koperasi sejalan

dengan prinsip-prinsip siyasah tanfiziyah yang menekankan pentingnya pelaksanaan kebijakan demi kepentingan umum.

Sementara itu, kendala teknis seperti keterbatasan modal usaha, minimnya pelatihan, dan kurangnya sarana pendukung menjadi tantangan dalam menjalankan aktivitas koperasi secara optimal. Menurut konsep siyasah tanfiziyah pemerintah dan pengurus memiliki kewajiban untuk mencari solusi terhadap hambatan tersebut melalui kerja sama, pemberian pelatihan, pendampingan, dan penguatan ekonomi masyarakat. Dengan demikian, penerapan nilai-nilai siyasah tanfiziyah dapat menjadi landasan dalam memperbaiki dan mengembangkan Koperasi Merah Putih agar lebih efektif dan bermanfaat bagi masyarakat.

PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan Koperasi Merah Putih di Nagari Tanjung Beringin merupakan implementasi kebijakan pemerintah dalam memperkuat ekonomi masyarakat berbasis desa melalui pendekatan koperasi. Proses pembentukannya diawali melalui Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) yang melibatkan berbagai unsur masyarakat sehingga mencerminkan penerapan prinsip partisipatif dalam pengambilan keputusan. Keberadaan koperasi memperoleh respons positif dari masyarakat karena dipandang mampu menjadi sarana peningkatan kesejahteraan ekonomi, penyedia akses permodalan, serta wadah pemberdayaan usaha masyarakat. Namun demikian, pelaksanaan koperasi masih menghadapi berbagai kendala pada aspek kelembagaan, administrasi, keterbatasan modal, sarana prasarana, serta kapasitas sumber daya manusia sehingga efektivitas pengelolaannya belum berjalan secara optimal.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi atau pembentukan kelembagaan semata, tetapi juga dipengaruhi oleh kesiapan organisasi dalam menjalankan fungsi manajerial. Kondisi ini sejalan dengan pendapat Nasution et al., (2024) yang menyatakan bahwa koperasi akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat apabila didukung oleh tata kelola organisasi yang baik dan partisipasi aktif anggotanya. Selain itu, Donatha & Sawitri, (2025) menegaskan bahwa keberhasilan koperasi sangat bergantung pada pertanggungjawaban hukum serta pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.

Hasil penelitian ini juga mendukung penelitian Waruwu et al., (2025) yang menyatakan bahwa koperasi merupakan sokoguru perekonomian nasional yang memiliki

fungsi strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan ekonomi kerakyatan. Temuan ini diperkuat oleh Sawitri et al., (2026) yang menjelaskan bahwa koperasi merupakan instrumen pemberdayaan ekonomi rakyat yang mampu meningkatkan kemandirian masyarakat apabila dikelola secara profesional.

Selanjutnya, penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Hutagaol et al., (2026) yang menyebutkan bahwa Koperasi Desa Merah Putih memiliki potensi besar dalam mendukung ketahanan ekonomi desa melalui penguatan kelembagaan serta pemberdayaan masyarakat. Akan tetapi, penelitian ini menemukan bahwa implementasi di tingkat nagari masih menghadapi berbagai hambatan administratif, teknis, dan kelembagaan sehingga tujuan program belum sepenuhnya tercapai.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih banyak mengkaji aspek regulasi maupun kontribusi ekonomi koperasi, penelitian ini menggunakan perspektif Fiqih Siyash Tanfiziyah sebagai kerangka analisis. Pendekatan ini sejalan dengan kajian Mayyadah et al., (2025) yang menjelaskan bahwa siyasah tanfiziyah menempatkan pemerintah sebagai pelaksana amanah yang berkewajiban menyelenggarakan kebijakan secara adil, transparan, dan bertanggung jawab demi terwujudnya kemaslahatan masyarakat.

Dalam perspektif Fiqih Siyash Tanfiziyah, pembentukan Koperasi Merah Putih di Nagari Tanjung Beringin telah mencerminkan penerapan prinsip amanah, musyawarah, keadilan, dan kemaslahatan. Prinsip tersebut tampak dari proses pembentukan koperasi melalui musyawarah desa, adanya pembagian tugas pengurus, serta orientasi koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Temuan ini sejalan dengan pendapat Mulyadi & Rahmati (2026) yang menyatakan bahwa keberhasilan Koperasi Merah Putih tidak hanya ditentukan oleh aspek ekonomi, tetapi juga oleh penerapan nilai-nilai syariah yang berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.

Di sisi lain, penelitian ini juga menemukan bahwa keterbatasan modal, sarana prasarana, dan kapasitas sumber daya manusia masih menjadi kendala utama dalam pengembangan koperasi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum sepenuhnya memenuhi prinsip good governance. Menurut Arifin, (2025) efektivitas pembentukan Koperasi Merah Putih sangat dipengaruhi oleh dukungan regulasi, pembinaan pemerintah, dan kesiapan kelembagaan dalam menjalankan fungsi organisasi.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa dukungan pemerintah memiliki peran yang sangat penting melalui pembinaan, pelatihan, pendampingan, serta fasilitasi akses

permodalan. Hasil ini memperkuat penelitian Purnamawati, (2025) yang menjelaskan bahwa pendampingan pemerintah merupakan faktor utama dalam keberhasilan pembentukan Koperasi Merah Putih sehingga koperasi mampu berkembang secara berkelanjutan.

Secara teoritis, penelitian ini memberikan implikasi terhadap pengembangan kajian Fiqih Siyasah Tanfiziyah, khususnya dalam implementasi tata kelola koperasi berbasis nilai-nilai Islam. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dan pengurus koperasi dalam meningkatkan kualitas tata kelola organisasi, transparansi pengelolaan keuangan, peningkatan kompetensi pengurus, serta penguatan partisipasi masyarakat sehingga tujuan pembentukan koperasi dapat tercapai secara optimal.

Meskipun demikian, penelitian ini masih memiliki keterbatasan karena hanya dilakukan pada satu lokasi penelitian dan koperasi yang diteliti masih berada pada tahap awal pengembangan sehingga dampak ekonominya belum dapat diukur secara menyeluruh. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan menggunakan cakupan wilayah yang lebih luas serta pendekatan mixed methods agar diperoleh gambaran implementasi Koperasi Merah Putih yang lebih komprehensif.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pembentukan Koperasi Merah Putih di Nagari Tanjung Beringin merupakan implementasi kebijakan pemerintah dalam memperkuat perekonomian masyarakat melalui pengembangan koperasi berbasis desa. Proses pembentukannya telah dilaksanakan melalui Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) dengan melibatkan pemerintah nagari dan masyarakat sebagai wujud penerapan prinsip partisipatif. Keberadaan koperasi memperoleh respons positif dari masyarakat karena dipandang memiliki potensi dalam meningkatkan kesejahteraan, memperluas akses permodalan, membuka peluang usaha, serta memperkuat ekonomi lokal. Namun demikian, pelaksanaan koperasi masih menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan modal, sarana dan prasarana, kapasitas sumber daya manusia, serta aspek administrasi dan tata kelola yang belum optimal sehingga efektivitas pelaksanaan program masih memerlukan penguatan. Dari perspektif Fiqih Siyasah Tanfiziyah, implementasi Koperasi Merah Putih telah mencerminkan prinsip amanah, musyawarah, keadilan, dan kemaslahatan, meskipun penerapan prinsip-prinsip tersebut masih perlu dioptimalkan melalui peningkatan sistem pengawasan, transparansi, dan profesionalisme pengelolaan koperasi.

Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam kajian Fiqih Siyasah Tanfiziyah dan tata kelola koperasi, dengan menunjukkan bahwa implementasi kebijakan ekonomi berbasis desa tidak hanya dipengaruhi oleh aspek kelembagaan dan regulasi, tetapi juga oleh penerapan nilai-nilai pemerintahan Islam yang menekankan amanah, keadilan, musyawarah, dan kemaslahatan. Selain memberikan kontribusi secara teoritis, penelitian ini juga memberikan kontribusi praktis bagi pemerintah daerah, pengurus koperasi, dan pemangku kepentingan sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan kapasitas kelembagaan, kualitas sumber daya manusia, transparansi pengelolaan, serta efektivitas pendampingan guna mewujudkan tata kelola koperasi yang profesional, akuntabel, dan berkelanjutan.

Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan penelitian pada beberapa Koperasi Merah Putih di berbagai daerah sehingga diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai implementasi kebijakan tersebut. Selain itu, penelitian mendatang dapat menggunakan pendekatan mixed methods atau pendekatan kuantitatif untuk mengukur secara empiris pengaruh faktor kelembagaan, tata kelola, kapasitas sumber daya manusia, dan dukungan pemerintah terhadap keberhasilan Koperasi Merah Putih. Kajian lanjutan juga dapat mengembangkan analisis dari perspektif hukum Islam lainnya atau teori tata kelola pemerintahan sehingga mampu memperkaya kajian mengenai pengelolaan koperasi berbasis nilai-nilai syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariandy, P., Putra, R., Imania, K., & Iriani, A. (2025). Identification of Challenges in the Implementation of the Merah Putih Cooperative Program. *Inovasi Pembangunan: Jurnal Kelitbangan*, 13(2). <https://jurnal.balitbangda.lampungprov.go.id/index.php/jip/article/view/1265>
- Arifin, A. (2025). *Analisis Yuridis Regulasi Pembentukan Koperasi Merah Putih guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa* [Master's thesis, Universitas Islam Sultan Agung]. <https://repository.unissula.ac.id/44673/>
- Donatha, Y. C., & Sawitri, D. A. D. (2025). Koperasi sebagai Badan Hukum dan Pertanggungjawabannya dalam Penggunaan dan Pengelolaan Keuangan Koperasi. *Ethics and Law Journal: Business and Notary*, 3(1). <https://journals.ldpb.org/index.php/eljbn/article/view/250>
- Hamdani, D. (2025). Koperasi Desa Merah Putih dengan Pendekatan Usaha Mudharabah: Studi Kasus di Desa Jingkang, Sumedang. *J-Coop: Journal of Co-Operative*, 1(2), 199–204. <https://doi.org/10.32670/jc.v1i2.23>
- Hutagalung, M. W. R., & Batubara, S. (2021). Peran Koperasi Syariah dalam Meningkatkan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi*

- Islam*, 7(3), 1494–1498. <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/2878>
- Hutagaol, I. A., Iswati, S., & Suwarno, P. (2026). Transformasi Ekonomi Pedesaan melalui Koperasi Desa Merah Putih: Kontribusi terhadap Ketahanan Ekonomi dan Pertahanan Negara Indonesia. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 5(2), 496–504. <https://al-haramjournal.id/J-CEKI/article/view/12897>
- Kader, M. A. (2018). Peran UKM dan Koperasi dalam Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan di Indonesia. *JURISMA: Jurnal Riset Bisnis & Manajemen*, 8(1), 15–32. <https://doi.org/10.34010/jurisma.v8i1.995>
- Mayyadah, P., Nur, E. R., & Sukandi, A. (2025). Review of fiqh siyasah tanfidziyah on the implementation of the performance of the Bumiarum Village Government, Pringsewu Regency. *Jurnal Hukum Sebasen*, 11(1), 271–280. <https://doi.org/10.37676/jhs.v11i1.8169>
- Mulyadi, D., & Rahmati, A. (2026). Revitalizing Merah Putih Village Cooperatives through Maqasid Sharia: A qualitative study of rural economic recovery in Indonesia. *Journal of Islamic Economics Lariba*, 12(1), 674–694. <https://journal.uin.ac.id/JIEI.lariba/article/view/44744>
- Muzaki, A., Luttadinata, Z., Putri, A. E., Kirana, M. G., Jannah, R. N., Firdaus, M. D., & Rifa'i, M. (2024). Politik Identitas dalam Pemilu di Indonesia: Tinjauan Prinsip-Prinsip Fiqh Siyasah. *Prosiding Nasional Pascasarjana IAIN Kediri*, 7, 35–52. <https://jurnalpascasarjana.iainkediri.ac.id/index.php/prosiding/article/view/3562>
- Nasution, S., Hidayati, S., Nasution, P. R., & Hasyim, H. (2024). Peranan Koperasi dalam Perekonomian Indonesia. *As-Syirkah: Islamic Economic & Financial Journal*, 3(2), 522–530. <https://doi.org/10.56672/syirkah.v3i2.160>
- Pratama, A. (2025). Konsep Pemikiran Hukum Islam dalam Bidang Siyasah. *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner*, 1(3), 1075–1087. <https://ojs.ruangpublikasi.com/index.php/jpim/article/view/695>
- Purnamawati, A. (2025). Pembekalan Pembentukan Koperasi Kelurahan Merah Putih di Kecamatan Astana Anyar Kota Bandung. *E-Coops-Day: Jurnal Ilmiah Abdimas*, 6(2), 267–274. <https://journal.ikopin.ac.id/index.php/ecoopsday/article/view/5495>
- Rahayu, B. S., & Utama, H. B. (2020). Pendampingan Pembentukan Badan Usaha Koperasi Simpan Pinjam “Makmur Jaya” Kelurahan Banjarsari Kecamatan Banjarsari Surakarta. *Wasana Nyata*, 4(1), 43–49. <https://doi.org/10.36587/wasananyata.v4i1.583>
- Saputri, A. R., Subandriyo, & Hardiyan, M. I. (2025). Koperasi Desa Merah Putih dalam Perspektif Pembangunan Desa dan Tata Kelola Pemerintahan. *Journal of Society Bridge*, 3(2), 95–106. <https://www.bk3s.org/ojs/jsb/article/download/83/84/444>
- Sawitri, I., Baskoro, S., Kusumastuti, S. Y., Sabu, J. M. S., Sudarwati, L., Nakuloadi, H., & Busnetty, I. (2026). *Koperasi dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat*. Star Digital Publishing. <https://play.google.com/store/books/details?id=w83JEQAAQBAJ>
- Thayf, H. S., Supartiningsih, & Syamsuddin, M. M. (2022). Koperasi sebagai Harapan Perekonomian Masa Depan. *Coopetition: Jurnal Ilmiah Manajemen*, 13(1), 45–54. <https://journal.ikopin.ac.id/index.php/coopetition/article/download/570/785/3888>

- Waruwu, S. Y., Waruwu, H. N. A., Setiawati, D., & Hidayat, R. A. L. (2025). Analisis Konseptual tentang Koperasi sebagai Sokoguru Perekonomian Indonesia. *Jurnal Ilmiah Feasible: Bisnis, Kewirausahaan & Koperasi*, 7(2), 167–174. <https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/JFB/article/view/55821>
- Wicaksono, H. N. (2025). *Apa dan Bagaimana Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih*. Penerbit NEM. <https://play.google.com/store/books/details?id=ILBwEQAAQBAJ>
- Wicaksono, R. W., Izzati, N., & Tambunan, L. R. (2020). Eksplorasi Etnomatematika pada Gerakan Pukulan Seni Pencak Silat Kepulauan Riau: Etnomatematika pada Gerakan Pukulan Seni Pencak Silat. *Jurnal Kiprah*, 8(1), 1–11. <https://doi.org/10.31629/kiprah.v8i1.1596>
- Yani, A., & Wahyuni, T. (2026). Model Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Kecamatan Sakra Barat. *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, 12(1), 93–99. <https://ejurnal.pps.ung.ac.id/index.php/Aksara/article/view/3097>
- Yuliani, W. (2018). Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif dalam Perspektif Bimbingan dan Konseling. *QUANTA: Kajian Bimbingan dan Konseling dalam Pendidikan*, 2(2), 83–91. <https://doi.org/10.22460/q.v2i2p83-91.1641>